

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumberdana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagaol ,2007).

Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Lulus , 2012). *Tax avoidance* yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Mangoting, 1999). Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014).

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Vidiyanna dan Bella, 2017).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, berikut terdapat beberapa kasus mengenai penghindaran pajak, yang pertama yaitu kasus yang dilakukan sejumlah nasabah di Indonesia di *Standart Chartered Plc* (<http://www.bbc.com/indonesia>). Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran perpajakan dengan menyembunyikan aset guna menghindari kewajiban pajak. Kasus kedua yaitu pada PT Toyota motor manufacturing Indonesia yang melakukan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak, modus yang dilakukan yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih ke Singapura, karena pajak di

Singapura lebih rendah dibanding di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen sedangkan singapura 17 persen.

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”*

Agency theory menjelaskan bahwa para pemegang saham mempunyai proteksi minim dalam menghadapi konflik agen, para pemegang saham memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan karena mempekerjakan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya (Yingcong Lan, 2012). Akan tetapi dalam prosesnya perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen, dimana yang seharusnya pihak manajemen perusahaan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham, namun sebaliknya pihak manajemen mengambil keputusan juga didasari atas kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2006).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi termasuk keputusan penghindaran pajak. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Dyreng et al. (2010) menguji pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Coles et al., (2004) menyebutkan risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan

sehingga dapat memberikan indikasi karakter *risk taking* atau *risk averse*. Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.

Leverage adalah penggunaan sumber dana berasal dari pinjaman untuk membiayai belanja perusahaan yang memiliki beban tetap (beban bunga). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut (Tommy, 2013). Sehingga, semakin tinggi utang perusahaan akan semakin tinggi beban bunga perusahaan yang dapat menurunkan ETR perusahaan, nilai ETR rendah menandakan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sesuai dengan Hendy (2014) yang menyatakan bahwa komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Hasil penelitian dari Ayu dan Maria (2015) dengan sampel 165 perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Hasil penelitian membuktikan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*,. Hal disebabkan perusahaan yang memiliki resiko yang tinggi cenderung akan menyajikan laporan keuangan apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak rendah. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono.

Hasil Penelitian dari Dewi dan Ketut (2014) dengan sampel seluruh perusahaan pamnufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil Penelitiannya adalah Karakter Esekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Hasil penelitian dari Ngadiman dan Christiany (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI periode 2010-2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak.

Hasil penelitian dari Gusti & Ketut (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI periode 2008-2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko.

Hasil penelitiannya berbeda beda ada yang berpengaruh positif (Gusti dan Ketut, 2014) ada juga yang berpengaruh negatif (Ayu dan Maria, 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka peneliti tertarik menguji kembali mengenai pengaruh karakter eksekutif dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latarbelakang diatas maka peneliti dapat menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Apakah Karakter Eksekutif dan *Leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh karakter eksekutif dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Karakter Eksekutif dan Leverage secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan (pemegang saham), manajer dan investor.